



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IKA PUSPITA SARI
2. Jabatan : DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA DAN AKADEMIK
3. NHK : 840703

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.373.680.000

1. Tanah Seluas 316 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 93.200.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 487 m²/20 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 150.440.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 575 m²/20 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.040.000
4. Tanah Seluas 99 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
5. Tanah Seluas 110 m² di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 103.000.000

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOBIL, BRIO MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000



5. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	35.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	283.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.794.680.000
III. HUTANG	Rp.	362.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.432.680.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.